

**EFEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA**
(Studi Kasus di Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX – X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)

TESIS

OLEH

**EPENDI PASARIBU
NPM. 111801016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Nama : Ependi Pasaribu

NPM : 111801016

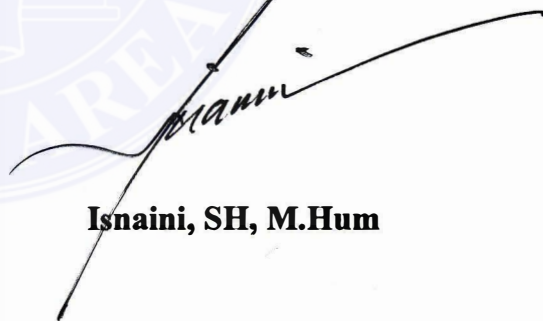
Menyetujui

Pembimbing I



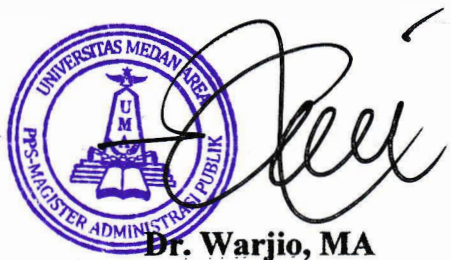
Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



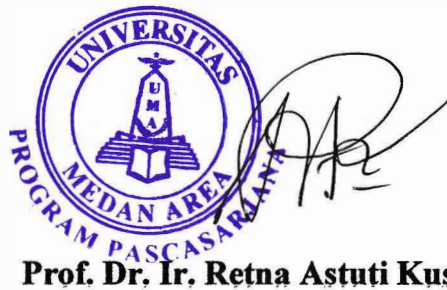
Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 10 April 2013

Nama : Ependi Pasaribu

NPM : 111801016



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Drs. Done Ali Usman, MAP

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ependi Pasaribu

NPM : 111801016

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

"Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)"

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, April 2013

Yang menyatakan,



Ependi Pasaribu

A B S T R A K

Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Nama : EPENDI PASARIBU
NPM : 111801016
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga sebagai lembaga yang berperan menjadi representasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini, maka data yang didapatkan di lapangan akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara tunggal yang dilakukan melalui tabel frekuensi dengan analisis deskriptif dengan menentukan rentang skala.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Kabupaten Labuhanbatu Utara, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterlibatan dan kemampuannya dalam sistem pemerintahan, dan faktor kesejahteraan.

Key word : *Efektifitas, BPD, Pemerintahan Desa*

KATA PENGANTAR

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa, lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR, dengan tujuan agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan

Beberapa faktor yang menentukan efektifitas BPD termasuk di Desa Sungai Raja adalah pencapaian tingkat faktor produktivitas, faktor kemampuan SDM sebab semakin baik sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa, maka semakin tinggi keterlibatan dan kemampuannya dalam sistem pemerintahan, dan tingkat faktor kesejahteraan, hal ini terbukti dengan kemampuan BPD yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan

aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu perdes sedangkan kebutuhan masyarakat akan tersalurnya aspirasi dalam Perdes semakin besar.

Medan, April 2013

Ependi Pasaribu
111801016

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan sukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *"Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX – X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)"*

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat mengikuti Ujian Tesis pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tesis ini belum dapat dikatakan sempurna dan masih jauh dari apa yang diharapkan, baik nilai ilmiahnya maupun struktur substansinya, berkenaan dengan hal ini penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari pihak pembaca guna menyempurnakan penulisan tesis ini.

Selama penulisan tesis ini, penulis telah menerima bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis dalam kesempatan ini menyatakan bahwa terwujudnya penyelesaian tesis ini berkat adanya bantuan / bimbingan dari pihak bapak / ibu dosen pembimbing, atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak terutama penulis sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA.
2. Direktur Pascasarja Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani. MS
3. Ketua Program Pascasarja Universitas Medan Area, Dr. Warjio, MA

4. Bapak Dr. Warjio, MA sebagai Komisi Pembimbing I atas bantuan dan bimbingannya hingga penulisan ini dapat diselesaikan
5. Bapak Isnaini, SH, M.Hum sebagai Komisi Pembimbing II atas bantuan dan bimbingannya hingga penulisan ini dapat diselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen, pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
7. Keluarga tercinta atas motivasi dan keikhlasannya mendampingi dan percaya yang penulis lakukan ini adalah untuk kebaikan keluarga.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarja Medan Area Seangkatan 2011
9. Seluruh Staf Pegawai Program Pascasarja Medan Area .
10. Ketua Badan Perwakilan Desa Sungai Raja Bapak Karnen.
11. Kepala Desa Sungai Raja Bapak Sarwono

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak/Ibu dosen dan semua rekan-rekan atas segala kesilapan dan kesalahan yang telah diperbuat penulis selama ini, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak lain yang memerlukannya.

Medan, April 2013

Ependi Pasaribu
111801016

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Hipotesis	12
BAB II :LANDASAN TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Pengertian Efektifitas.....	13
2.1.2 Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	16
2.1.3. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa	22
2.1.4. Fungsi BPD Dalam Sistem Pemerintahan Desa.....	28

2.1.5. Efektifitas BPD Dalam Pembangunan Desa	32
2.1.6 Efektifitas BPD Dalam Sistem Pemerintahan Desa	37
2.2. Reviw Peneliti Terdahulu	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.2. Bentuk Penelitian	37
3.3. Populasi dan Sampel.....	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional	46
3.6. Teknik Analisis Data	49
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Keadaan Umum	50
4.1.1 Keadaan Geografis.....	50
4.1.2 Keadaan Demografi	51
4.2. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sungai Raja	55
4.2.1 Pemerintahan Desa	56
4.2.2 Badan Permusyawaratan Desa	58
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Karakteristik Responden	61
5.2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPD di Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara	68
5.2.1 Fungsi BPD dalam Menampung aspirasi masyarakat	69
5.2.2 Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.....	87

5.2.3 Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian	88
5.2.4 Fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa	89
5.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tupoksi	
BPD Desa Sungai Raja Kec.Na IX-X Labuhanbatu Utara	101

BAB VI : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1 Kesimpulan	109
6.2. Implikasi Kebijakan	111

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	48
Tabel 4.1 Daftar Penduduk Desa Sungai Raja	52
Tabel 4.2 Kepercayaan dan Sarana Ibadah	52
Tabel 4.3 Mata Pencaharian	53
Tabel 4.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	54
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan	54
Tabel 5.1 Distribusi Responden Tokoh Masyarakat menurut Alamat	62
Tabel 5.2 Distribusi Responden Tokoh Masyarakat menurut Usia.....	62
Tabel 5.3 Distribusi Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Menurut Usia	63
Tabel 5.4 Distribusi Responden Tokoh Masyarakat menurut Jenis Kelamin ...	64
Tabel 5.5 Distribusi Responden Tokoh Masyarakat menurut Tempat lahir.....	64
Tabel 5.6 Distribusi Responden Tokoh Masyarakat menurut tingkat Pendidikan	65
Tabel 5.7 Distribusi Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Menurut Tingkat Pendidikan	66
Tabel 5.8 Distribusi Responden Tokoh Masyarakat menurut Pekerjaan	67
Tabel 5.9 Distribusi Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Menurut Tingkat Pekerjaan	68
Tabel 5.10 Sumber Pengetahuan Resonden Tentang Peranan BPD	70

Tabel 5.11 Penjelasan Responden Tentang TUPOKDI BPD	71
Tabel 5.12 Penjelasan Tokoh Masyarakat Tentang Jumlah Anggota BPD	72
Tabel 5.13 Penjelasan Tokoh Masyarakat Tentang Nama Anggota BPD.....	73
Tabel 5.14 Tingkat Pengetahuan Responden tentang Fungsi BPD	75
Tabel 5.15 Tanggapan Responden tentang Tupoksi BPD	76
Tabel 5.16 Tanggapan Responden tentang Terpilihnya Anggota BPD	78
Tabel 5.17 Tanggapan Responden tentang Pertemuan Anggota BPD.....	79
Tabel 5.18 Tanggapan Responden tentang Pertemuan dengan Masyarakat	80
Tabel 5.19 Tanggapan Responden Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tentang Upaya BPD dalam menampung Ide	81
Tabel 5.20 Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam mengikuti musyawarah	82
Tabel 5.21 Partisipasi responden dalam menyampaikan saran kepada BPD	84
Tabel 5.22 Penjelasan Usulan Tentang RPJM Des	85
Tabel 5.23 Penjelasan Responden Tentang Jenis Peraturan Desa Yang telah ditetapkan Kepala Desa bersama BPD	95
Tabel 5.24 Penjelasan Responden Tentang pengetahuan mengenai Perdes Yang telah ditetapkan Kepala Desa bersama BPD	96
Tabel 5.25 Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat	97
Tabel 5.26 Tanggapan Responden tentang Bentuk Partisipasi masyarakat	98
Tabel 5.27 Tanggapan Responden tentang kendala yang dialami BPD Dalam menjalankan Tupoksinya	101
Tabel 5.28 Tanggapan Responden Tentang Kinerja BPD	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)

Menurut Sumardjo, (1984:55) Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa, lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR, dengan tujuan agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)

Menurut Phinanditia (2010:2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Wiyono (2007:55) Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.”

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Beratha, N. 1992. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Emitai Atzoni 1989, *Perspekif Sistem Pemerintahan Desa Yogyakarta* : UII Press.
- Gie, Kwik, Kian. 2003. *Reformasi Birokrasi dalam mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintah*. (Online), ([http:// www. Bappenas. Go.id Index. Php Module = file manager & Func =download & pathext =Content Express & view =167 Reformasi % 20 Kinerja. Pdf.](http://www.Bappenas.Go.id/Index.Php/Module=file_manager&Func=download&pathext=ContentExpress&view=167Reformasi%20Kinerja.Pdf))
- Hamid, Edi Suandi, et, al. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta : BPTE.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjun Surjaman. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pambudi, Himawan S dkk. 2003. *Politik Pemberdayaan Dalam Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Pondok Pustaka.
- Peraturan Daerah kabupaten Labuhanbatu Utara No 10 tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Phinanditia (2010) *Jurnal Universitas Serang*
- Rozaki, Abdur, dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta : IRE Pres
- Sinambela, Lijan, Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi aksara.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Konisius.
- Soesanto, Astrid. S. 1995 *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : Bina Cipta.
- Sumardjo, U.1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito.

Susianingrat, B. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta : Aksara Baru.

Sondang P Siagian 2000, *Efektifitas Organisasi* Jakarta: Buma aksara.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *tentang pemerintahan Desa*.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Widodo, joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media.

Wignyosubroto, dkk,2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta : *Institute For Local Development*.

Wiyono, Suko. 2006. *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Faza Media

Winardi. (2003).*teori organisasi dan pengorganisasian*.Jakarta:PT Raja Grapindo Persada

Yuniarsih,Tjutju. (1998).*menejemen organisasi*. Bandung: IKIP Bandung Press

KUISIONER

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin :
3. Jabatan :

II. Petunjuk Pengisian

Peneliti menginginkan pendapat anda tentang Efektifitas Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa. Petunjuk pengisiannya yaitu: pertanyaan pada bagian ini menyediakan jawaban dengan kode (A = >3, B = 2-3, C = <2).

Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Tinggi yaitu Rata-rata skor : >3
2. Sedang, yaitu Rata-rata skor : 2-3
3. Rendah, yaitu Rata-rata skor : <2

No.	Pernyataan	Tingkat Keterampilan		
		A	B	C
1.	Sumber Pengetahuan Responden Tokoh Masyarakat tentang Peranan BPD			
2.	Penjelasan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Tupoksi BPD			
3.	Pengetahuan tentang jumlah dan nama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Raja			

4.	Tingkat pengetahuan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan tentang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
5.	Tingkat Pengetahuan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di Masyarakat			
6.	Bentuk Penyuluhan yang dilakukan oleh BPD tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
7.	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Kelayakan Terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Raja Kec. Sungai Raja			
8.	Tanggapan responden Tokoh Masyarakat tentang kelayakan terpilihnya anggota BPD			
9.	Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat tentang Sering Tidaknya BPD Mengadakan Pertemuan dengan Masyarakat			
10.	Penjelasan responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang sering tidaknya BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat			
11	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Upaya yang dilakukan BPD dalam menampung dan menyalurkan saran dan ide dari masyarakat			
12	Partisipasi responden tokoh masyarakat dalam mengikuti Musyawarah/Pertemuan			

	dengan BPD			
13	Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat			
14	Bentuk Usulan Pembangunan menurut Responden Tokoh Masyarakat yang sampai kepada BPD			
15	Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang Tindak lanjut BPD untuk usulan pembangunan fisik			
16	Penjelasan Usulan Responden Tokoh Masyarakat yang Telah Ditampung dalam RPJMDes dan Dituangkan dalam Bentuk Peraturan Desa			
17	Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat tentang Jenis-jenis Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD			
18	Tanggapan Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Tingkat Pengetahuan Mengenai Jenis-jenis Peraturan Desa yang telah Ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa			
19	Partisipasi Responden Tokoh Masyarakat dalam Musrenbang Desa sebagai tahap dalam Pembuatan Peraturan Desa			
20	Tingkat Pemahaman Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Prosedur Pembuatan Peraturan Desa			

----- *Terima kasih* -----